

DIPLOMASI

dalam Politik Global



Editor: Dr. Sukawarsini Djelantik

UNPAR PRESS

11/03/2016

DIPLOMASI

dalam Politik Global

No. Kelas	327-2	DIP
No. Induk	140757	Tgl 11/03/2016
Hodiah/Beli	
Dari	Yayasan LINPAR	

DIPLOMASI

dalam Politik Global

Editor:
Dr. Sukawarsini Djelantik



327.2
DIP
140757 - R/SB - FISIP
11/03/2016

UNPAR PRESS

2016

Judul Buku:

Diplomasi dalam Politik Global

Editor:

Dr. Sukawarsini Djelantik

Desain, tata letak, sampul:

L. Bobby Suryo K.

Penyelas:

Melania Atzmarnani

ISBN: 978-602-69017-5

Diterbitkan oleh:

Unpar Press

Jalan Ciumbuleuit 100,

Bandung 40141

Cetakan I: 2016

Isi di luar tanggung jawab Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan YME, selesailah penulisan buku yang berjudul "Diplomasi dalam Politik Global" ini. Penyusunan buku didasarkan pada keprihatinan akan terbatasnya bahan-bahan referensi baik untuk perkuliahan maupun penelitian, yang saat ini dialami oleh mahasiswa maupun peneliti. Maka kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi studi Hubungan Internasional. Proses penyusunan buku telah melewati perjalanan panjang, dengan materi isi merupakan kompilasi dari berbagai sumber, yaitu perkuliahan, kuliah tamu, hasil penelitian, skripsi dan thesis dari tahun 2009 sampai 2015. Tulisan-tulisan dari thesis dan skripsi merupakan hasil pemikiran dari para mahasiswa program sarjana dan pascasarjana (Magister Ilmu Sosial) di Universitas Katolik Parahyangan.

Buku ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu Penyusun sampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. *Hasan Kleib*, Direktur Jenderal Diplomasi Multilateral pada Kementerian Luar Negeri RI, atas presentasinya di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Bahan-bahan presentasi menjadi acuan yang sangat berharga dalam menyusun tulisan mengenai topik yang sama dalam buku ini.
2. *Febrian A. Ruddyard*, Direktur Timur-Tengah pada Kementerian Luar Negeri RI, atas presentasinya di Universitas Katolik Parahyangan. Topik yang dibawakan "Diplomasi Indonesia di Timur Tengah", sangat menginspirasi dan sarat informasi, sehingga dijadikan artikel dengan judul yang sama dalam buku ini.
3. *Andy Rachmianto*, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS), Kementerian Luar Negeri RI, atas presentasinya Universitas Katolik Parahyangan. Presentasinya juga menjadi materi yang berharga untuk penyusunan buku ini.
4. *Mangadar Situmorang* dan *J. Irawan Hartono*, atas artikel dan hasil penelitiannya yang berjudul: "Diplomasi Indonesia Untuk Reformasi Dewan Keamanan PBB". Terimakasih juga disampaikan untuk Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar

Negeri RI, yang memungkinkan terselenggaranya penelitian bersama dengan *Parahyangan Center for International Studies* (PACIS), UNPAR, pada tahun 2010.

5. *Lona Raditya Soedarsono*, untuk artikelnya berjudul: *Diplomasi Indonesia Terhadap Belanda dalam Memperoleh Pengakuan Internasional*.
6. *Vivi Pusvitasari*, untuk artikelnya yang berjudul: "Diplomasi Indonesia Terhadap Timor Leste Paska Jajak Pendapat".
7. *Vinca Puteri*, untuk artikelnya yang berjudul: "Diplomasi Indonesia Untuk Rekonsiliasi Dengan Timor Leste".
8. *Graha Christy Blegur*, untuk artikelnya yang berjudul: "Diplomasi Amerika Serikat Menghadapi Krisis di Libya".
9. *Trissia Widjaya*, untuk tulisannya yang berjudul: "Diplomasi Publik Tiongkok Melalui Peran Jacky Chan."
10. *Regina Faustine Darwanto*, untuk artikelnya yang berjudul: "Diplomasi Budaya Indonesia di Korea Selatan".
11. *Jessica Christina*, untuk artikelnya yang berjudul: "Diplomasi Publik Indonesia di Etiopia."
12. *Karina Sukmaputeri*, atas artikelnya yang berjudul: "Diplomasi Publik Amerika Serikat Melalui Facebook di Indonesia".
13. L. Bobby Suryo K. dan Melania Atzmarnani dari Unpar Press, yang telah membuat desain, tata letak, sampul, melakukan proses *editing*, dan menyelaras tulisan. Tanpa keduanya buku ini tidak dapat dipublikasikan dengan penampilan seperti sekarang.

Harapan dari tulisan-tulisan ini adalah menjadi sumbangan pemikiran bagi diplomasi Indonesia, baik diplomat maupun penstudi. Selain itu, untuk memperkenalkan diplomasi secara luas kepada kalangan publik. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tulisan-tulisan ini masih jauh dari sempurna. Maka segala masukan, saran dan kritik akan sangat dihargai demi perbaikan dimasa-masa mendatang. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat, bagi pengembangan studi diplomasi secara khusus, dan hubungan internasional secara umum.

Bandung, 8 Januari 2016
Dr. Sukawarsini Djelantik
sukedj@unpar.ac.id



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
PENDAHULUAN	xi
I. DIPLOMASI MULTILATERAL	
1. Diplomasi Multilateral Indonesia <i>Sukawarsini Djelantik</i>	3
2. Diplomasi Indonesia di Timur Tengah <i>Sukawarsini Djelantik</i>	31
3. Diplomasi Indonesia untuk Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata <i>Sukawarsini Djelantik</i>	51
4. Diplomasi Indonesia untuk Reformasi Dewan Keamanan PBB <i>Mangadar Situmorang, Irawan J. Hartono, Sukawarsini Djelantik</i>	71
5. Diplomasi Indonesia-Australia Terkait Skema REDD <i>Sukawarsini Djelantik</i>	101
II. DIPLOMASI BILATERAL	
6. Diplomasi Indonesia terhadap Belanda dalam Memperoleh Pengakuan Internasional (1945-1949) <i>Lona Raditya Soedarsono</i>	117

Diplomasi dalam Politik Global

7.	Diplomasi Indonesia terhadap Timor-Leste Paska Jajak Pendapat <i>Vivi Pusvitasary</i>	139
8.	Diplomasi Indonesia untuk Rekonsiliasi dengan Timor Leste <i>Vinca Puteri</i>	155
9.	Diplomasi Amerika Serikat Menghadapi Krisis di Libya <i>Graha Christy Blegur</i>	169
10.	Diplomasi Indonesia dalam Membela Kepentingan TKI <i>Sukawarsini Djelantik</i>	189
III. DIPLOMASI PUBLIK		
11.	Diplomasi Publik Tiongkok Melalui Peran Jacky Chan <i>Trissia Widjaya</i>	213
12.	Diplomasi Budaya Indonesia di Korea Selatan <i>Regina Faustine Darwanto</i>	233
13.	Diplomasi Publik Indonesia di Etiopia <i>Jesicca Christina</i>	249
14.	Diplomasi Publik Amerika Serikat melalui Facebook di Indonesia <i>Karina Sukmaputri</i>	263
DAFTAR PUSTAKA		279
TENTANG PENULIS		335

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Suasana Diplomasi Multilateral; Sidang Majelis Umum PBB September 2015 membahas krisis pengungsi di Suriah	5
Gambar 2	Diplomasi Multilateral dalam Forum G-20	18
Gambar 3	Duta Besar Hasan Kleib, Direktur Jenderal Multilateral Kemenlu mewakili Indonesia pada forum multilateral	21
Gambar 4	Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara	32
Gambar 5	Peta Revolusi "Arab Spring"	38
Gambar 6	Direktur Timur Tengah Kemenlu RI, Febrian Ruddyard, mewakili kepentingan Indonesia di Kawasan	46
Gambar 7	Pengiriman Satuan Tugas Kontingen Garuda (Konga) ke <i>Lebanon (UNIFIL)</i> , 2014; bentuk komitmen Indonesia menjaga perdamaian internasional	54
Gambar 8	Sidang Dewan Keamanan PBB di New York	79
Gambar 9	Posisi Strategis Indonesia sebagai 'penghubung' di antara Kubu Konservatif dan Kubu-kubu Pengusung Reformasi DK-PBB	84
Gambar 10	<i>Concentric Circles</i> Politik Luar Negeri Indonesia	88
Gambar 11	Modalitas Indonesia sebagai 'bridge builder' dan Inisiator Baru	91
Gambar 12	Kerjasama Internasional untuk pemberantasan terorisme	94
Gambar 13	Delegasi Indonesia dalam forum PBB dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	96
Gambar 14	Sekjen PBB Ban Ki Moon membuka acara UNFCCC 2007 di Bali-Indonesia	98

Diplomasi dalam Politik Global

Gambar 15	Kerusakan Hutan di Kalimantan yang Mendorong Lahirnya Skema REDD	106
Gambar 16	Peta Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan hasil perundingan Linggarjati	127
Gambar 17	Perundingan di atas Kapal USS Renville	129
Gambar 18	Peta wilayah Republik Indonesia sesuai dengan hasil Perundingan Renville	131
Gambar 19	Konferensi Meja Bundar, 1949	134
Gambar 20	Peta Perbatasan Indonesia-Timor-Leste	142
Gambar 21	Kemerdekaan Timor Leste 1999 menyisakan berbagai persoalan bilateral dengan Indonesia	148
Gambar 22	Voting di DK-PBB untuk memberlakukan zona larangan terbang diatas langit Libya, 2011	175
Gambar 23	Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI Tatang B. Razak diantara TKI di Arab Saudi	203
Gambar 24	Jacky Chan sebagai Ikon Diplomasi Publik Tiongkok	220
Gambar 25	Skema 9 Jalur dalam diplomasi multijalur	235
Gambar 26	Peserta Lomba Pidato Bahasa Indonesia 2010	237
Gambar 27	Peserta <i>workshop</i> dan Pameran Batik	241
Gambar 28	Para siswa memainkan angklung	243
Gambar 29	Rumah Gadang di hutan rekreasi <i>Cheongtaesan</i>	244
Gambar 30	Penonton Konser <i>Knock Knock Indonesia 2013</i>	245
Gambar 31	Publikasi KKI dalam 부산일보	246
Gambar 32	Poster Konser <i>Knock Knock Indonesia 2012-2013</i>	247
Gambar 33	Duta Besar RI untuk Etiopia Ramli Saud memperkenalkan Wayang golek	256
Gambar 34	Facebook Barack Obama	265
Gambar 35	Data statistik pengguna internet di Indonesia tahun 1998-2012	267
Gambar 36	Halaman <i>facebook</i> kedutaan AS di Jakarta	270
Gambar 37	Komentar masyarakat	271

PENDAHULUAN

"Seni perang tertinggi adalah mengalahkan lawan tanpa bertarung"
(Sun Tsu, "the Art of War")

"Diplomasi adalah seni mengatakan "Pergilah ke neraka" secara halus sehingga mereka menanyakan arahnya"
(Winston S. Churchill)

"Taktik adalah kemampuan menginjak kaki seseorang tanpa merusak warna semir sepatunya"
(Harry S. Truman)

Pernyataan-pernyataan diatas menunjukkan pentingnya diplomasi dalam bernegosiasi untuk memperjuangkan kepentingan negara. Sebagai salah satu instrumen dalam politik luar negeri, keberhasilan berdiplomasi dan bernegosiasi dapat menyelamatkan negara dari peperangan, memperoleh konsesi perdagangan, meningkatkan citra positif di negara penerima, dan membela kepentingan warga negara di negara lain. Diplomasi dikatakan berhasil apabila konflik dapat diselesaikan tanpa melalui kekerasan, peperangan, atau dengan pengorbanan yang paling sedikit. Ketika terjadi konflik antar-negara, diplomasi dapat menjadi alat yang efektif untuk menjaga agar hubungan kedua belah pihak tetap baik, menjauhkan konflik yang berkepanjangan dan dengan akibat yang seminimal mungkin. Diplomasi sebagai pelaksanaan kebijakan luar negeri, selain juga merupakan manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, juga merupakan cara untuk menjalin kerjasama dalam hubungan internasional demi mencapai kepentingan bersama, melalui negosiasi dan tawar-menawar. Maka kemampuan berdiplomasi merupakan seni dan keterampilan yang sangat diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan negara baik dalam skala bilateral maupun bilateral, dalam situasi resmi maupun melalui *lobby-lobby* di belakang layar.

Diplomasi dalam Politik Global

Untuk meningkatkan citra positif negara, diplomasi dewasa ini telah berkembang, tidak saja dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah tetapi juga melibatkan lembaga-lembaga maupun individu yang tidak berada di dalam struktur pemerintahan. Keterlibatan aktor-aktor pemerintah bersama-sama dengan aktor-aktor bukan negara (*non-state actors*) ini dikenal sebagai diplomasi publik atau diplomasi multijalur. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transformasi pada era globalisasi ini, maka keterlibatan publik semakin meningkat dan semakin signifikan. Mereka yang dapat terlibat dalam diplomasi publik termasuk kelompok akademisi, kelompok bisnis, aktivis perorangan, organisasi non-pemerintah baik nasional maupun internasional (NGO/INGO), kelompok agama, kelompok kepentingan maupun warga negara biasa. Yang tidak kalah pentingnya yaitu peran keterlibatan media massa. Pada era digital seperti saat ini, dimana informasi dapat diperoleh dengan mudah melalui perangkat teknologi yang canggih, peran media sosial juga semakin besar dalam menentukan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan adanya berbagai perkembangan tersebut, maka artikel-artikel dalam tulisan ini mewakili fenomena-fenomena baru dalam diplomasi. Sebagai contohnya, munculnya banyak penelitian yang terkait dengan pemakaian media-media sosial seperti *facebook*, *twitter*, atau *youtube*, dalam meningkatkan keberhasilan diplomasi publik.

Meskipun disadari pentingnya diplomasi publik, akan tetapi peran pemerintah tetap yang paling menentukan. Maka aktivitas diplomasi bilateral dan multilateral, baik dalam konferensi maupun pertemuan multi aktor, tetap menempati posisi yang strategis. Aktivitas diplomasi Publik berperan sebagai pendukung dan penunjang bagi keberhasilan diplomasi yang dilakukan aktor-aktor pemerintah. Dengan pertimbangan tersebut, maka pembahasan buku "Diplomasi dalam Politik Global" ini terbagi atas tiga bagian besar yaitu: Diplomasi Multilateral, Diplomasi Bilateral, dan Diplomasi Publik.

Bagian pertama buku ini membahas Diplomasi Multilateral, dengan pertama-tama memfokuskan pembahasan pada Diplomasi Multilateral secara umum. Tulisan kedua membahas Diplomasi Indonesia di Timur Tengah. Timur Tengah secara khusus menarik bagi Indonesia, mengingat sebagai kawasan yang paling dinamis dibandingkan dengan kawasan lainnya, selain memegang kunci penting bagi aktivitas perekonomian global. Peran itu terkait erat dengan sumber daya alam berupa minyak yang merupakan sumber utama kemakmuran. Selain itu, Timur Tengah juga menjadi negara penerima dari para Tenaga Kerja Wanita (TKW), tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di berbagai sektor informal

Pendahuluan

dari rumah tangga, konstruksi bangunan, tenaga kerja profesional dan mahasiswa. Maka diplomasi di Timur Tengah selain erat kaitannya dengan kepentingan Indonesia dalam membela warga negaranya, juga perang dan damai. Artikel lainnya difokuskan pada "Diplomasi RI Untuk Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata", terkait berbagai upaya Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Isu-isu seputar keamanan internasional dan perlucutan senjata sarat dengan tarik-menarik kepentingan antar berbagai pihak, termasuk negara-negara kekuatan utama (*major powers*). Maka diperlukan berbagai upaya diplomasi untuk mengamankan kepentingan Indonesia mewujudkan perdamaian dunia sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945. Tulisan selanjutnya mengenai Diplomasi Indonesia untuk Reformasi Dewan Keamanan (DK)-PBB, terkait dengan signifikansi lembaga tersebut untuk mencegah perang dan menjaga perdamaian dunia. Indonesia berkepentingan agar reformasi dapat berjalan baik, dengan harapan lembaga dunia ini dapat lebih representatif bagi para anggotanya, selain lebih demokratis dalam pengambilan keputusan yang berdampak global. Tulisan selanjutnya juga tidak kalah penting yaitu diplomasi terkait isu lingkungan hidup: "Diplomasi Konferensi Indonesia terhadap Australia Terkait Skema REDD", yang membahas diplomasi yang dilakukan melalui mekanisme konferensi.

Pada bagian Diplomasi Bilateral, dibahas "Diplomasi Indonesia Terhadap Belanda Dalam Memperoleh Pengakuan Internasional". Artikel membahas berbagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara yang baru merdeka untuk memperoleh pengakuan internasional, dengan fokus pada diplomasi bilateral dan multilateral. Tulisan kedua berjudul: "Diplomasi Indonesia Terhadap Timor Leste Paska Jajak Pendapat", membahas episode ketika Timor Timur (nama ketika menjadi bagian dari Indonesia sampai tahun 1999), baru memperoleh kemerdekaan pada tahun 1999, sampai setelah kemerdekaan dan berakhir pada tahun 2014. Tulisan ketiga dapat diapresiasi sebagai episode lanjutan dalam memotret hubungan bilateral RI-Timor Leste, yaitu "Diplomasi Indonesia dalam Rekonsiliasi Hubungan Bilateral dengan Timor Leste". Tulisan menyoroti pentingnya melakukan berbagai upaya rekonsiliasi untuk menghapus sisa-sisa trauma kekerasan yang terjadi pasca jajakpendapat tahun 1999. Selain itu, berbagai upaya rekonsiliasi diperlukan agar kedua negara dapat melangkah kedepan dengan menata semua persoalan yang menjadi ganjalan bagi terjalinnya hubungan bilateral yang lebih baik. Tulisan selanjutnya berjudul: "Diplomasi Amerika Serikat Menghadapi Krisis di Libya", membahas berbagai upaya pencegahan yang dilakukan

Diplomasi dalam Politik Global

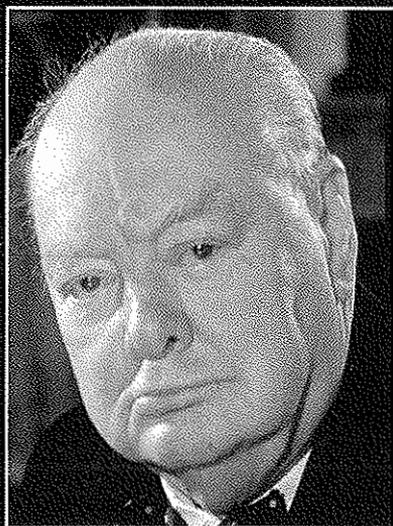
oleh AS dalam menghadapi krisis. Ulasan terakhir pada bagian ini bertajuk: "Diplomasi Indonesia Dalam Membela Kepentingan TKI", yang erat kaitannya dengan peran pemerintah dalam membela kepentingan warga negaranya khususnya di Saudi Arabia dan Malaysia. Berbagai masalah yang ditimbulkan oleh status sebagai pekerja di luar negeri, perlu ditangani dengan berbagai upaya diplomasi baik bilateral maupun multilateral. Upaya-upaya tersebut, beserta permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjadi fokus pembahasan dan analisis pada bagian ini.

Pembahasan mengenai Diplomasi Publik, pertama-tama membahas Diplomasi Publik Tiongkok melalui Peran Jackie Chan. Tiongkok sangat menyadari arti penting Jackie Chan sebagai seorang selebriti internasional yang memiliki akses yang tinggi terhadap pemberitaan dan publikasi media global. Akses inilah yang dimanfaatkan oleh Tiongkok dalam meningkatkan citranya sebagai negara yang anti-hegemoni. Pembahasan selanjutnya terkait diplomasi Budaya Indonesia di Korea Selatan dan Ethiopia. Kedua tulisan membahas pentingnya *soft diplomacy*, sebagai salah satu upaya untuk menyukseskan diplomasi antar pemerintah atau *government to government (G to G) diplomacy*. Tulisan terakhir bertopik "Diplomasi Publik Amerika Serikat Melalui Facebook", memfokuskan pada peran media sosial yang semakin meningkat pada era informasi dan komunikasi global dewasa ini. Pemakaian media sosial secara optimal oleh Kedutaan Besar AS di Indonesia, menunjukkan bahwa pemerintah AS menyadari pentingnya menjangkau publik secara luas tidak saja melalui media massa konvensional, melainkan juga media-media sosial. Diharapkan bahwa jangkauan yang luas dapat lebih mengintensifkan komunikasi pemerintah terutama untuk kelompok muda di Indonesia.

Harapan dari tulisan-tulisan ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi diplomasi Indonesia, selain memperkenalkan diplomasi secara luas kepada kalangan publik. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tulisan-tulisan ini masih jauh dari sempurna. Maka segala masukan, saran, dan kritik akan sangat dihargai, demi perbaikan dimasa-masa mendatang. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat, bagi pengembangan studi diplomasi secara khusus, dan hubungan internasional secara umum.

Bandung, 8 Januari 2016
Dr. Sukawarsini Djelantik

I
DIPLOMASI
MULTILATERAL



Diplomacy is the art of telling
people to go to hell in such a way
that they ask for directions.

— *Winston Churchill* —

Diplomasi Multilateral Indonesia

Sukawarsini Djelantik

Pengantar

Aktivitas diplomasi multilateral erat kaitannya dengan kerjasama dan keterlibatan Indonesia dalam berbagai permasalahan global. Pada setiap program pemerintah terkait kerjasama dengan organisasi internasional, Indonesia wajib mengedepankan kepentingan nasional sebagai landasan kebijakan luar negeri. Keterlibatan dalam berbagai forum multilateral perlu mempertimbangkan kepentingan nasional, selain menjadi alasan utama agar Indonesia tetap menjadi negara berdaulat di masa mendatang. Saat ini Indonesia terlibat di 246 organisasi internasional. Konsekuensi dari keterlibatan ini adalah besarnya anggaran yang dialokasikan setiap tahun, untuk membayar kontribusi (iuran) keanggotaan dan mengikuti berbagai pertemuan. Pada tahun 2012, Indonesia telah mengeluarkan dana iuran sebesar Rp 263 milyar lebih. Pada tahun 2013 membengkak menjadi Rp 292 milyar lebih atau tepatnya 292.172.054.133,48 rupiah.¹ Jumlah itu belum termasuk biaya yang dikeluarkan ketika mengikuti konferensi-konferensi internasional. Sementara itu, amanat untuk mengikuti organisasi-organisasi internasional tertuang pada Keppres No. 64/1999 tentang keanggotaan dan kontribusi pemerintah RI pada organisasi-organisasi Internasional, yang menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia harus memberi manfaat yang maksimal. Selain manfaat bagi kepentingan nasional, juga disesuaikan pada peraturan perundangan, selain efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan negara.

Diplomasi Multilateral Pada Kementerian Luar Negeri

Direktorat Jenderal (Dirjen) Multilateral Kemlu mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas diplomasi multilateral, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis. Dalam melaksanakan tugas, Dirjen

¹ Hasan Kleib, M.A. Dirjen Multilateral Kemlu RI, presentasi pada kuliah tamu di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 3 Desember 2014.

Diplomasi dalam Politik Global

berfungsi penyiapan perumusan kebijakan luar negeri, pelaksanaan kebijakan, perundingan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur.² Dirjen Multilateral Kemlu terdiri dari Sekretariat dan dibantu oleh 6 direktorat yaitu: Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup, Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual, dan Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang.³ Sasaran yang hendak dicapai adalah pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional dalam bidang-bidang multilateral, dan meningkatnya peran aktif Indonesia. Indonesia juga telah memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan milenium pasca 2015, melalui peran sebagai salah satu Ketua Bersama dari Panel Tingkat Tinggi PBB untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015. Indonesia juga aktif diberbagai forum multilateral yang berdampak pada kebijakan strategis nasional, seperti forum APEC, WTO, G-20, dan lainnya.

Diplomasi multilateral Indonesia tahun 2010-2014 difokuskan pada peningkatan peran dan diplomasi Indonesia". Strategi mencapainya melalui peningkatan partisipasi dan inisiatif dalam berbagai forum termasuk mengupayakan menjadi tuan rumah pada berbagai pertemuan multilateral. Kegiatan lainnya adalah mengidentifikasi dan mengkaji partisipasi Indonesia pada organisasi kerjasama multilateral, untuk kepentingan efisiensi, dengan melihat manfaat langsung bagi kepentingan nasional. Dirjen juga bertugas mengupayakan dukungan lintas sektoral dalam implementasi kerjasama multilateral.

Diplomasi dengan memperkenalkan produk-produk budaya Indonesia, telah diawali dengan diakuinya batik sebagai *World Intangible Heritage* oleh UNESCO pada Oktober 2009.⁴ Pengakuan terhadap batik ini melengkapi keris dan wayang yang telah terlebih dahulu diakui UNESCO untuk kategori yang sama. Perjuangan diplomasi multilateral selanjutnya meliputi masalah akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit sharing*) di berbagai fora, termasuk memperjuangkan hak paten pada *World International Property Organization (WIPO)*⁵ melalui komite *Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore (GTRKF)*,⁶ WHO (untuk *virus sharing*), FAO untuk *Convention on Biodiversity*, dan pada organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Yang tidak kalah pentingnya adalah menyusun konsep kebijakan (rancangan umum) kerjasama Selatan-selatan. Dibawah

2. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia:
<http://www.kemlu.go.id/Pages/Orgz.aspx?IDP=5&l=id>, diakses tanggal 16 Januari 2015.

3. *Ibid.*

4. <http://www.antaranews.com/berita/156389/batik-indonesia-resmi-diakui-unesco>, diakses tanggal 24 Februari 2015.

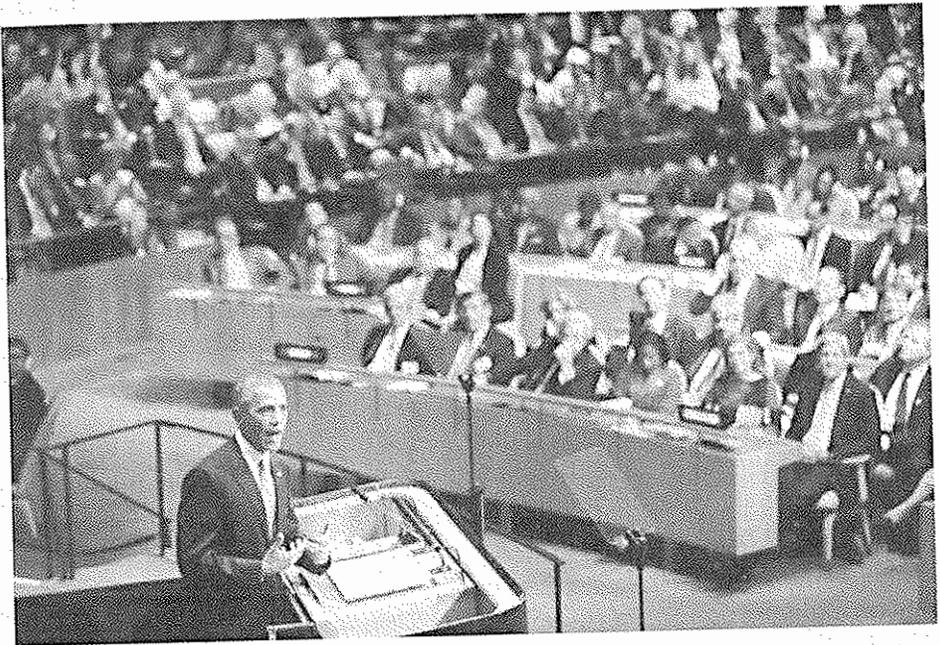
5. WIPO: www.wipo.int/portai/en/index.html, diakses tanggal 24 Februari 2015.

6. WIPO: http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=110, diakses tanggal 24 Februari 2015.

ini akan dibahas empat kerjasama multilateral yang penting bagi Indonesia, yaitu dalam forum PBB, GNB, OKI, dan G-20.

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan di San Francisco, Amerika Serikat (AS) pada tanggal 24 Oktober 1945 ini memiliki 193 negara anggota. PBB berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan yang layak, dan Hak Asasi Manusia. Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007. PBB sebagai organisasi internasional dengan legitimasi yang bersumber dari keanggotaan yang bersifat universal, diharapkan menjadi forum penanganan berbagai tantangan dan krisis global yang semakin kompleks di masa mendatang.⁷



Gambar 1.
Suasana diplomasi multilateral; Sidang Majelis Umum PBB September 2015
membahas krisis pengungsi di Suriah.⁸

⁷ United Nations: <http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml>, diakses tanggal 29 Januari 2015.

⁸ <http://darkroom.baltimoresun.com/2015/09/daily-brief-sept-28/#1>, diakses tanggal 8 Januari 2016.

Lembaga-lembaga penting dibawah PBB adalah Sekretariat, Majelis Umum (MU), Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), Dewan Keamanan (*Security Council*), Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*), dan Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*).⁹ Sekretariat adalah penyelenggara kegiatan sehari-hari yang melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi dibawah PBB. Masalah-masalah terkait aktivitas PBB diantaranya mengatur operasi keamanan, mensurvey kecenderungan ekonomi dan sosial, mempersiapkan penelitian mengenai pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, dll. MU merupakan organ penting yang anggotanya adalah semua negara anggota. Tugas-tugas PBB sangat tergantung pada mandat yang diberikan MU. Proses revitalisasi sedang dijalankan saat ini untuk meningkatkan peran, otoritas, efektivitas, dan efisiensi. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai ketua sidang Majelis Umum PBB pada sidang ke-26 tahun 1974.¹⁰ Dewan Keamanan (DK) bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional.¹¹

Mengingat perubahan pola-pola hubungan internasional dewasa ini, sebuah proses reformasi dalam DK-PBB tengah dibahas dalam beberapa dekade terakhir, termasuk masalah keanggotaan, dan kepemilikan hak-hak istimewa oleh 5 negara besar pemegang hak veto. Dewan Ekonomi dan Sosial menangani persoalan-persoalan global terkait ekonomi, sosial, dan tugas-tugas dari agen-agen khusus PBB, dimana dalam badan ini, tiap negara memiliki satu suara. Organisasi lainnya adalah Pengadilan Internasional (ICJ) yang bemarkas di Den Haag, Negeri Belanda, yang menangani masalah-masalah hukum internasional. Isu-isu yang ditangani meliputi sengketa antar negara, selain memberikan opini hukum untuk PBB dan badan-badan khususnya. Statuta ICJ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PBB. Organisasi Dewan Perwalian, yang didirikan pada tahun 1945 diberi mandat untuk memberikan perwalian terhadap 11 wilayah yang masih berada dalam pemerintahan di 7 negara anggota. Dewan ini menjamin agar tahapan-tahapan yang memadai dijalankan sebelum sebuah wilayah memperoleh kemerdekaannya. Sampai tahun 1994, seluruh wilayah perwalian sudah mendapatkan kemerdekaannya.¹²

Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi dibawah PBB, seperti Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), ILO (Organisasi Buruh Internasional), dan FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian). Proses pengambilan keputusan

9 United Nations : <http://www.un.org/en/mainbodies/index.shtml>, diakses tanggal 16 Januari 2015.

10 <http://www.un.org/en/ga/president/bios/bio26.shtml>, diakses tanggal 29 Januari 2015.

11 United Nations Security Council, <http://www.un.org/en/sc/members/>, diakses tanggal 29 Januari 2015.

12 Perserikatan bangsa-bangsa:

<http://www.un.org/en/mainbodies/index.shtml>, diakses tanggal 16 Januari 2015.